

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19. Untuk mengatasi hal sebagaimana tersebut, Kemendikbudristek berupaya melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pada masa pademi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi). Kurikulum merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya kemendikbudristek dalam rangka untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi, dan menjadi semakin diperparah karena pandemi (Kemdikbud, 2023).

Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Untuk mengetahui arah perubahan kurikulum dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Arah Perubahan Kurikulum

Rancangan dan Implementasi Kurikulum Saat Ini	Arah Perubahan Kurikulum
Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan perminggu.	Struktur kurikulum yang lebih fleksibel , jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun.

Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.	Fokus pada materi yang esensial . Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun.
Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual.	Memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik.	Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik.

Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih:

Tabel 1.2 Kebebasan Menentukan Kurikulum

Pilhan 1	Pilhan 2	Pilhan 3
Kurikulum 2013 (secara penuh)	Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan)	Kurikulum Merdeka

(Kemdikbud, 2023)

Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai

target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Tidak hanya di sekolah penggerak, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lainnya. Menurut data Kemdikbud Ristek tahun 2022, telah ada sebanyak 143.265 sekolah yang sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA (Panginan, 2022).

Perubahan kurikulum yang terjadi tidak lepas dari kontribusi kebijakan dari lembaga itu sendiri. Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan transformasional lembaga sekolah dapat memberikan kontribusi terhadap kesiapan perubahan. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi dan memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya (Kustini, 2018).

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik (Angelika, 2019).

Adapun berdasarkan studi pendahuluan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kota Bandung yang akan dijadikan subject penelitian, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan penerapan kurikulum merdeka belajar di antaranya, belum siapnya sekolah baik dalam segi fasilitas, sumber daya manusia maupun kesiapan peserta didik itu sendiri dalam mengikuti perkembangan kurikulum terbaru dengan sistem yang telah di perbaharui sehingga munculnya kekhawatiran yang menimbulkan kecemasan

dalam belajar mengajar serta minimnya tenaga pendidik yang siap mengikuti pelatihan yang dianjurkan oleh pemerintah menimbulkan sistem kurikulum merdeka cenderung belum diterapkan di lembaga terkait dan belum sepenuhnya terlaksana. Kurangnya dukungan dari pihak kepala madrasah mengenai kurikulum merdeka belajar yang dianggap terbilang baru mulai di implementasikan dan menjadi salah satu pilihan yang tidak diwajibkan sedangkan pemahaman mengenai kurikulum yang telah berjalan sebelumnya masih belum 100% seluruhnya menguasai sistem kurikulum tersebut, hal ini mendasari kepala madrasah tidak mewajibkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka belajar di lingkungan sekolah.

Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka (Angelika, 2019).

Berangkat dari pernyataan diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah dengan menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul: **Hubungan Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Dengan Kebijakan Kepala Madrasah** (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri se-Kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kurikulum merdeka belajar di Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung ?
2. Bagaimana kebijakan kepala Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung ?
3. Bagaimana hubungan antara kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan kurikulum merdeka belajar di Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan hubungan antara kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi pendidikan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah instansi yang diteliti. Serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam implementasi teoritik manajemen pemasaran dan citra lembaga pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah. Manfaat bagi lembaga, penelitian ini bisa memberikan informasi bagaimana hubungan penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah. Manfaat lainnya bagi peneliti mendapatkan pengalaman untuk kemudian hari bisa diimplementasikan secara nyata untuk mencapai mutu lembaga pendidikan islam yang berkualitas.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini terdiri dari dua variable pokok yaitu variable X tentang kurikulum merdeka belajar dan variable Y tentang kebijakan kepala madrasah.

Perkataan kurikulum dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lampau. Istilah kurikulum boleh dikatakan baru di Indonesia dan menjadi populer sejak tahun lima puluhan. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru dan dipelajari siswa. Ronald C. Doll (Sukmadinata, 2011) berpendapat bahwa *The commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of courses of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school.*

Definisi Doll tidak hanya menunjukkan adanya perubahan penekanan dari isi kepada proses, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan lingkup, dari konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas. Apa yang dimaksud dengan pengalaman siswa yang diarahkan atau menjadi tanggung jawab sekolah mengandung makna yang cukup luas. Pengalaman tersebut dapat berlangsung di sekolah, di rumah atau di masyarakat, bersama guru atau tanpa guru, berkenaan langsung dengan pelajar ataupun tidak. Definisi tersebut juga mencakup berbagai upaya guru dalam mendorong terjadinya pengalaman tersebut serta berbagai fasilitas yang mendukungnya.

Menurut Syahril & Asmidir Ilyas, dkk (2009) “Secara sempit kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti/diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya dalam lembaga pendidikan tertentu.” Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak asal ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas.

Aciel Miel dalam Nasution. S.(2011) penganut pendirian yang luas mengenai kurikulum, menjelaskan bahwa definisi tentang kurikulum sangat luas yang mencakup bukan hanya pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, apresiasi, cita-cita serta norma-norma, melainkan juga pribadi guru, kepala sekolah serta seluruh pegawai sekolah, pegawai administrasi dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan murid-murid.

Ada tiga konsep kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, sebagai bidang studi menurut (Sukmadinata, 2012). Kurikulum sebagai substansi, merupakan suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal dan evaluasi. Kurikulum sebagai suatu sistem, mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seluruh program atau rencana yang dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan guna memberikan pengalaman pendidikan yang potensial bagi siswa dibawah tanggung jawab sekolah dengan tujuan agar siswa terbiasa berfikir dan berbuat menurut kelompok masyarakat tempat dia hidup. *Regulation provides direction on the need to develop and implement the eight national education standard: 1) standard of content, 2) standard of process, 3) standard of competency graduates, 4) standard of teachers and staffs, 5) standard of facilities and infrastructure, 6) standard of management, financing, and 6) standard of assesment in education* (Elvianti, siska. 2012:4).

Kurikulum madrasah memiliki fungsi dalam materi pengetahuan yang merupakan bentuk dari tanggung jawab madrasah untuk tolak ukur peningkatan madrasah. Kepala madrasah harus memahami dan senantiasa mengetahui sistem organisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan membangun sumber daya manusia melalui manajemen personalia yang dapat dilakukan oleh kepala madrasah (Suwardi, 2014).

Menurut Zainal Arifin (2013) dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut:

1. Studi kelayakan dan Analisis kebutuhan.
2. Perencanaan Kurikulum.
3. Pengembangan rencana operasional kurikulum.
4. Pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum dilapangan.
5. Implementasi kurikulum.

6. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.
7. Perbaikan dan penyesuaian.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V.Good (1959) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus (Subarsono, 2013), yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi.

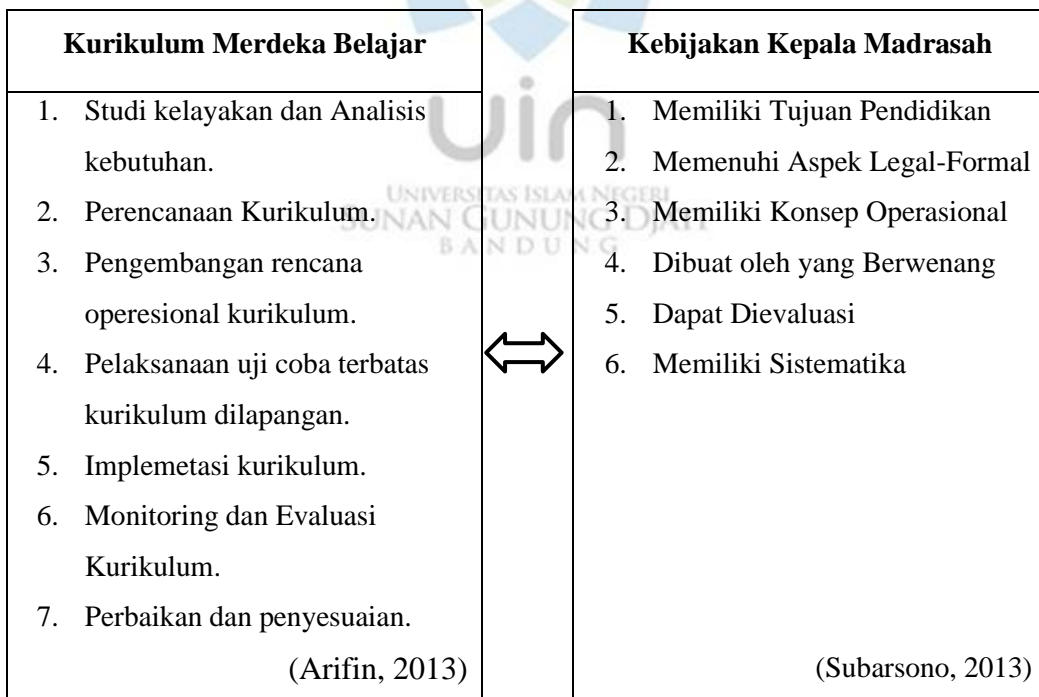
6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian

faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Grand Theory penelitian ini merujuk pada kurikulum merdeka belajar yang diterapkan oleh madrasah yang mana hal tersebut memiliki fungsi dalam materi pengetahuan yang merupakan bentuk dari responsibilitas madrasah untuk tolak ukur peningkatan madrasah. Kepala madrasah harus memahami dan senantiasa mengetahui sistem kurikulum yang mana hal tersebut di butuhkan dalam sebuah instansi guna meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut bergantung pada kebijakan kepala madrasah selaku pemegang kendali kebijakan di sekolah.

Untuk memudahkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan menggambarkan skema sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi, perkiraan atau dugaan sementara mengenai suatu permasalahan yang harus di buktikan kebenarannya dengan menggunakan data dan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid dan reliabel, atau dengan kata lain hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji secara empiris. (Yaya dan Tedi, 2008:124). Dalam penelitian ini penulis menyoroti dua variable pokok, yaitu variable pertama kurikulum merdeka belajar yang merupakan variabel terikat (X) dan kebijakan kepala madrasah yang merupakan variabel bebas (Y), dengan ukuran signifikan atau tidaknya hubungan penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah.

Karena penulis mengacu pada asumsi dasar teori ini, maka penulis ini akan bertitik tolak dari hipotesis maka penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif yang signifikan antara kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah, uji hipotesa yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : = (Hipotesa Nol)

Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandung.

H_1 = (Hipotesa Kerja)

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kepala madrasah Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandung.

G. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan objek serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun memiliki focus yang berbeda, diantaranya:

1. Skripsi oleh Inawati pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka” penelitian di

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2 / R Square) sebesar 0,469 yang artinya persentase pengaruh variabel sistem otomasi perpustakaan terhadap variabel kepuasan pemustaka memberikan pengaruh sebesar 46,9% sedangkan 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel bebas tersebut memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai F Hitung sebesar 86,674 dengan taraf signifikansi 0,000. Sedangkan nilai F table dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ derajat kebebasan (df) = N_1 (numerator) = 1 dan N_2 (denominator) = 98 maka diperoleh nilai F tabel dari tabel F sebesar 3,94. Dari data di atas terlihat jelas bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($86,674 > 3,94$) dan signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menerangkan bahwa variabel bebas memiliki hubungan/pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem otomasi perpustakaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.

2. Jurnal oleh Veronica resty panginan dan Susianti pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Perbandingan Penerapan Kurikulum 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kurikulum merdeka belajar terdapat hasil belajar matematika siswa. jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain *ex-post facto*, prosedur pengumpulan data di mulai dari penentuan sampel dilakukan dengan Teknik *random sampling*, pengumpulan data primer berupa hasil ujian tengah semester pada mata pelajaran matematika serta populasi dan sampel penelitian yaitu siswa kelas III Nicolaus dengan jumlah siswa 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum merdeka belajar diterapkan di SD Frater bakti luhur pada tahun 2022 yaitu pada semester genap, penelitian ini membandingkan antara penerapan kurikulum 2013 pada semester ganjil dan penerapan kurikulum merdeka belajar pada semester genap. Penerapan kurikulum merdeka belajar tidak lagi berbasis tema melainkan mata pelajaran yang diampuh oleh masing-masing guru

berdasarkan kesepakatan tentang bidang studi apa yang akan diajarkan, penerapan kurikulum merdeka mulai diadopsi dengan baik oleh siswa. Berdasarkan hasil analisis data terjadi perbedaan yang signifikan terhadap hasil ujian tengah semester di semester ganji (penerapan kurikulum 2013) dan hasil ujian tengah semester di semester genap (penerapan kurikulum merdeka belajar) setelah diberlakukan uji *paired sample t-test* yang menunjukkan terjadinya perbedaan signifikan dari perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas III nicolaus di SD frater bakti luhur kota makasar.

3. Skripsi oleh Penelitian yang dilakukan Elza Nur Aziza, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Manajemen Konvergensi Media pada Redaksi Newsroom Diskominfoantik Kabupaten Bekasi”. Hasil penelitian strategi manajemen konvergensi media pada redaksi Newsroom Diskominfoantik Kabupaten Bekasi menunjukkan, pertama pengaturan platform media penyebaran berita yang digunakan oleh Newsroom bersifat konvergensi media dengan menggunakan platform media penyebaran beritanya yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kedua, penanganan proses produksi konten berita di Newsroom ditentukan dari rapat proyeksi untuk menganalisis topik-topik liputan. Hasil dari liputan di lapangan akan masuk ke proses budgeting yang akan diolah menjadi konten berita sebelum disebarluaskan dan disesuaikan dengan platform media penyebarannya.
4. Jurnal oleh Neng Nurwiati pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran di Sekolah”. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan dunia pendidikan akan selalu bergerak menuju yang lebih baik lagi baik bagi pendidik maupun peserta didik. Setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran tematik-integratif guru berperan

sebagai fasilitator bagi peserta didik, pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dengan dampingan dari gurunya. Kurikulum 2013 juga menekankan pada pembentukan sikap peserta didik nampak ingin memadukan pesan-pesan dalam kurikulum sebelumnya. Guru adalah perancang masa depan peserta didik, dan sebagai perancang profesional, guru harus berusaha membentuk pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik dan berkualitas, serta siap berperan aktif dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Untuk itu guru perlu memulainya dari hal-hal yang kecil dan konkret, mulai dari masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah, dengan tetap berpikir besar dan visioner. Guru harus tetap profesional akan tugasnya walaupun terjadi pergantian kurikulum di Indonesia, dengan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa senang terhadap pembelajaran yang diberikan.

5. Skripsi oleh Penelitian yang dilakukan Wawan Kurniawan, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2012 dengan judul “Hubungan Antara Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Digital dan Pengembangan Potensi Peserta Didik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling berbasis digital tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengembangan potensi peserta didik, dengan taraf signifikansi 0,848. Yang artinya $0,848 > 0,05$ maka tidak terdapat korelasi atau hubungan layanan bimbingan dan konseling berbasis digital dengan pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya juga tidak terdapat jenis korelasi pada penelitian ini adalah korelasi negatif, karena antara kedua variabel tidak berhubungan secara signifikan. Jenis hubungan variabel layanan bimbingan dan konseling berbasis digital dengan pengembangan potensi peserta didik
6. Jurnal oleh Tono Supriatna Nugraha pada tahun 2022 yang berjudul “Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran”. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu fokus Kemdikbudristek saat ini. Implementasi Kurikulum Merdeka salah satunya bertujuan untuk pemulihan krisis pembelajaran

pasca pandemi Covid-19. Krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 ini, mengakibatkan satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Darurat yang sudah dilaksanakan selama pandemi sebagai masukan untuk implementasi Kurikulum Merdeka nantinya. Perubahan merupakan sesuatu yang alamiah dan selalu akan terjadi, termasuk dalam dunia Pendidikan. Krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Berbagai strategi telah dikembangkan oleh Kemendikbud untuk kemudian implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikannya masing-masing. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dengan dikembangkannya platform untuk membantu dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Selain itu, pelibatan komunitas belajar sebagai tempat berbagi praktik baik dengan melibatkan guru, siswa dan akademisi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat terlihat gambaran ideal mengenai implementasi Kurikulum Merdeka sehingga seluruh stakeholder yang terlibat dapat secara optimal dalam upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19.

7. Jurnal oleh Ummi Inayati pada tahun 2022 yang berjudul “Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21 di SD/MI”. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa Kurikulum merdeka belajar diresmikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI). Tujuan kurikulum ini adalah mengoptimalkan tersebarluasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakulikuler yang beragam. Mendukung pemulihan pembelajaran merupakan karakteristik utama Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini juga mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penggunaan teknologi. Peserta didik diberi kebebasan untuk berfikir dan belajar dari sumber mana saja, agar mampu mencari pengetahuan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SD/MI

mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penerapan atau implementasi kurikulum merdeka (IKM) di jenjang SD/MI, yaitu: Katagori Mandiri Belajar, katagori mandiri berubah dan katagori mandiri berbagi pada jenjang kelas I dan kelas IV SD/MI mulai tahun ajaran 2022/2023.

8. Jurnal oleh Zahrotul Hanah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Kebijakan Sekolah untuk Mengembangkan Mutu Internal Siswa SD Taman Muda”. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa Kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan karakter dalam rangka untuk mengembangkan mutu internal peserta didik tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan sekolah. Dalam hal ini sistem Peningkatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) kemudian dirumuskan sebagai salah satu kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu internal siswa SD Taman Muda. Kebijakan yang di implementasikan sekolah berupa pendidikan karakter merupakan program yang bersifat proses dan menitik beratkan pada hal-hal yang dapat menunjang tercapainya tujuan diselenggarakannya pendidikan dan mengembangkan mutu internal siswa. Pemantauan kinerja kebijakan sekolah dilakukan melalui pemeriksaan oleh Kepala Sekolah terhadap tim Peningkatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) yang telah diberi wewenang demi terlaksananya kebijakan tersebut.
9. Skripsi oleh Penelitian yang dilakukan Masrurroh, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2022 dengan judul “Aktivitas Siswa Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler BTQ Hubungannya dengan Kemampuan Membaca Al-Qur’an”. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dengan nilai rata-rata akhir 2,69 yang berada pada rentang 2,60 hingga 3,39, Aktivitas siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler BTQ dikategorikan netral. 2) Kemampuan membaca Al-Quran siswa yang sebenarnya tergolong kurang baik, dengan nilai rata-rata 55,0, yang berada pada rentang 50-59. 3) Pada skala 0,80 hingga 1,00, korelasi antara Aktivitas siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler BTQ (variabel X)

hubungannya dengan kemampuan membaca Al-Quran (variabel Y) sangat tinggi yaitu sebesar 0,99. Pengujian hipotesis menghasilkan t hitung 32,90 dan t tabel 0,432 yang menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Dengan demikian, aktivitas siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler BTQ berhubungan dengan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas VII MTs As-Sulaimaniyyah Cianjur.

10. Skripsi oleh Penelitian yang dilakukan Luthfy, mahasiswa program studi kependidikan islam Institut Agama Islam Negeri walisongo Semarang, pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Pemasaran Jasa Pendidikan Terhadap Citra Lembaga dalam Perspektif Masyarakat Pengguna di SMP Islam Al Azhar 14 Semarang”. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel X yaitu strategi produk, strategi biaya, strategi biaya dan strategi promosi, sedangkan untuk variabel Y yaitu citra produk, citra biaya, citra lokasi, dan citra promosi. Hasil dalam penelitian menyatakan pemasaran jasa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap citra lembaga karena nilai dari hasil uji F sebesar 19,201 lebih besar dari nilai level of significant yang ditentukan yaitu 5% sebesar 4,196 dan 1% sebesar 7,636, dengan sumbangan efektif sebesar 40,67%.

Dari kajian pustaka yang diuraikan diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu tempat penelitian yang cangkupan wilayahnya lebih luas dan tempat yang berbeda yaitu pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandung, selain itu fokus penelitiannya juga berbeda, pada penelitian ini lebih fokus pada kurikulum merdeka belajar sedangkan penelitian sebelumnya belum terfokus pada kurikulum merdeka, selanjutnya pada indikator juga terdapat perbedaan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel X adalah kurikulum merdeka belajar sedangkan untuk variabel Y adalah kebijakan kepala madrasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang nantinya akan diketahui seberapa besar hubungan penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Negeri se- Kota Bandung.